

ISBN : 978-623-94837-7-7

Buku Monograf

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

**Disusun Oleh :
Sishadiyati
Mohammad Wahed**



**Penerbit
Mitra Abisatya**

Buku Monograf

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Disusun Oleh :

**Sishadiyati
Mohammad Wahed**

Penerbit : CV. Mitra Abisatya

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Penulis :

Sishadiyati

Mohammad Wahed

ISBN : 978-623-94837-7-7

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia

oleh :

CV. Mitra Abisatya

Jl. Panduk No 36 A Surabaya

Telp 082132261603

Email : penerbitmitraabisatya@gmail.com

Cetakan pertama, September 2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memproduksi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku monograf ini dengan judul " PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL" .

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Pembangunan ekonomi daerah dapat dimulai pada pembangunan daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya karena keduanya sama sekali tidak bersifat pasif dan sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan, keduanya harus ditempatkan pada kedudukan yang sebenarnya yakni sebagai unsur yang sangat penting, dinamis dan bahkan sangat menentukan dalam strategi-strategi pembangunan secara keseluruhan, terutama pada negara sedang berkembang yang berpendapatan rendah.

Untuk meningkatkan pembangunan daerah, terutama pada daerah pedesaan yang sebagian besar merupakan daerah pertanian, maka pemerintah daerah beru-paya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui Pengembangan Ekonomi Lokal.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Definisi dan Tujuan Pengembangan Ekonomi Lokal.	5
2.2 Peran Lembaga Ekonomi Lokal Dalam Penyediaan Layanan Dasar	10
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Analisis Location Quotient (LQ)	12
3.2 Analisis Deskriptif Kualitatif	13
3.3 Analisis SWOT	13
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum	15
4.2 Hasil Analisis Dan Pembahasan	22
BAB V KESIMPULAN.....	36
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di era otonomi daerah dan globalisasi saat ini, daerah harus semakin meningkatkan kapasitas dan kemampuannya. berani melakukan perubahan serta mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dinilai mampu mengatasi berbagai persoalan tersebut karena sifat pendekatannya yang holistik. Namun sebelum sebuah daerah menerapkan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). dirasakan perlu bagi para stakeholder di daerah untuk memahami konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) serta relevansi pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dengan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian di daerah.

Pelaksanaan otonomi di banyak daerah hingga saat ini telah menimbulkan dampak negatif terhadap dunia usaha dan perdagangan. Sejumlah hasil studi melaporkan bahwa setelah otonomi daerah pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara mengenakan lebih banyak pajak dan retribusi daerah. Selain itu, sejumlah regulasi non tarif yang diberlakukan pemerintah pusat dan daerah juga

menciptakan distorsi pasar dan menurunkan daya saing produk yang dihasilkan oleh produsen di daerah tersebut terhadap produk sejenis yang diproduksi daerah lain. dan bahkan memberikan kontribusi terhadap ketidakmampuan produk lokal dalam menahan laju masuknya impor produk sejenis dari negara lain. Laporan studi tersebut sejalan dengan hasil kajian lainnya yang menunjukkan bahwa dunia usaha di Indonesia, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menghadapi banyak kendala dan hambatan dalam menjalankan usahanya selain keberadaan berbagai pungutan pajak dan retribusi. Hambatan tersebut adalah sulitnya mendapatkan lahan murah, ketidaktersediaan infrastruktur yang memadai, berbelitnya pengurusan perijinan, rendahnya akses terhadap sumber dana, sulitnya mengakses informasi pasar dan teknologi serta berbagai hambatan lain yang menjadi permasalahan yang sangat erat dengan dunia usaha terutama UMKM. Semua kendala tersebut pada akhirnya mengganggu perkembangan usaha, menghambat investasi yang bermuara pada ketidakmampuan daerah dalam meningkatkan nilai tambah, menciptakan kesempatan kerja baru, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan.

Kawasan pesisir merupakan kawasan yang potensial di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Indonesia memiliki 81.000 km pantai dan 17.508 pulau. Potensi perikanan di Indonesia sangat besar dengan

potensi ikan lestari sekitar 6,17 juta ton per tahun, namun hanya 38% ikan di perairan nusantara dan 20% ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sudah dimanfaatkan (Dahuri dalam Oktaviani, 2012).

Dengan kekayaan hasil laut, potensi kawasan pesisir tidak hanya berupa komoditas perikanan mentah. Sumberdaya manusia di kawasan pesisir juga merupakan potensi yang bisa dikembangkan. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang identik dengan kemiskinan. Padahal dengan potensi sumberdaya alam yang besar, masyarakat pesisir bisa diberdayakan dalam pengelolaan sumberdaya tersebut untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat lokal untuk menciptakan suatu iklim usaha dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, dalam kasus ini adalah sumberdaya pesisir. Pengembangan wilayah seperti ini disebut dengan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Untuk menerapkan PEL di suatu daerah, selain dibutuhkan kerjasama antara dua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat, serta material atau bahan baku, diperlukan juga manajemen kegiatan serta penyediaan modal untuk menyokong kegiatan PEL tersebut (Munir dan Fitanto, 2007).

Kecamatan Bulak merupakan salah satu kecamatan di Kota Surabaya yang memiliki kawasan pesisir. Pada kecamatan ini sudah berkembang kegiatan perdagangan dan jasa berbasis perikanan dan pesisir, namun

pengembangannya belum optimal. Padahal kegiatan ini berpotensi menjadi pemicu peningkatan perekonomian masyarakat setempat dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Karena itu dilakukan suatu kajian untuk mengembangkan kawasan pesisir di Kecamatan Bulak melalui pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal berbasis perikanan.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan arahan pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Bulak melalui pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), dengan sasaran sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi komoditas perikanan basis di Kecamatan Bulak
2. Mengidentifikasi potensi, masalah, peluang, dan ancaman pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Bulak
3. Menyusun strategi pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Bulak berdasarkan potensi, masalah, peluang, dan ancaman (SWOT)

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Definisi dan Tujuan Pengembangan Ekonomi Lokal

Pada masa lalu saat pembangunan ekonomi Indonesia bertumpu pada kebijakan dan otoritas pemerintah pusat. pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh berbagai kebijakan yang lerulama berlokus pada pemberian subsidJ. pembebasan pajak (tax holiday) dan penyediaan Infrastruktur murah dalam rangka menarik investasi untuk sektor industri. Namun. berbagai kebijakan lersebut ternyata sangat berpihak pada industri besar dan tidak berhasil menanamkan pondasi yang kual pada industri domestik karena tingginya ketergantungan pada bahan baku impor dan rendahnya tenaga kerja yang dapel dJserap. Konsep PEL. terlama yang baru. memberi penekanan pada kekuatan untuk memobilisasi sumber daya. kapesltas dan keterampilan yang terdapat dan dimiliki oleh lokal (daerah} untuk d imanlaatkan bagi lercepeinya pembangunan ekonomi daerah yang berkua!Jtas dan berkelanjutan. Di era otonomi daerah saat ini. pemeriniah daerah menjadi sangal berkepentingan untuk mampu menciptakan kond1S1 yang dJdam-idamkan tersebut sehingga PEL menjadi pendekaian yang sangal relevan bagi kola dan kabupeien di Indonesia Pengalaman penerapen konsep PEL di banyak negara lermasuk di sejumlah daerah di

Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah daerah memainkan peranan penting dalam merangsang prakarsa pembangunan ekonomi yang berkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan. Di tingkat kota atau kabupaten, campur tangan pemerintah daerah sangat berkaitan dengan tersedianya kerangka kebijakan dan peraturan, penyediaan barang publik, kemudahan akses terhadap pelayanan publik dan adanya stimulasi terhadap terdapatnya kesempatan kerja, peningkatan nilai tambah dan perbaikan tingkat pendapatan masyarakat terutama masyarakat miskin.

Mendefinisikan term PEL tidaklah mudah. Walau tidak ada definisi yang seragam mengenai PEL, dalam buku ini PEL didefinisikan sebagai: "Terjolinnya kerja sama kolektif antara Pemerintah, dunia usaha serta sektor non Pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dengan upaya merangsang dan menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan". Dalam definisi PEL tersebut, ada dua kata kunci yang dapat diambil yaitu 1) kerja sama antarsemua komponen dan 2) pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal.

Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan proses di mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan

pekerjaan (Blakely and Bradshaw, 1994). Selain itu, menurut (Munir, 2007) Pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaankelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Jadi, pengembangan wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal.

Menurut Blakely dalam Supriyadi (2007, h.103-123) dalam keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: 1) perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha; 2) perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan; 3) keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran; dan 4) keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal. Dalam kaitannya dengan teori pertumbuhan ekonomi, maka Krugman (1994) mengatakan bahwa investasi sumber daya manusia menjadi lebih penting peranannya dalam pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas bagi negara sedang berkembang merupakan faktor penting dalam upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan negara

lain. Era informasi dan teknologi yang berkembang dewasa ini semakin membuktikan bahwa penguasaan, teknologi yang baik akan berdampak pada kualitas maupun kuantitas pembangunan itu sendiri. Agar teknologi dapat dikuasai, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam konteks proses produksi, maka adanya penguasaan teknologi yang baik, maka akan mendorong terjadinya inovasi teknologi. Inovasi teknologi tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan penemuan produk produk baru dan cara produksi yang lebih efisien (Barro dalam Romer, 1994, h.36).

Meskipun pendekatan lokal dalam pengembangan ekonomi semakin menarik perhatian negara-negara sedang berkembang, sampai kini belum ada suatu definisi yang disepakati secara luas. Tetapi inisiatif pengembangan ekonomi lokal tidak perlu menunggu adanya suatu definisi yang disepakati secara luas tersebut, karena mungkin tidak akan pernah ada. Yang lebih penting adalah sebuah definisi kerja yang dapat dipegang sebagai acuan arah dan garis-garis besar cakupan programnya. Pengembangan ekonomi lokal seyogianya tidak dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif, tetapi sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Berikut ini dikemukakan arah tujuan dan cakupan inisiatif pengembangan ekonomi lokal menurut perspektif GTZ (2004) dalam Dendy, et.al (2004): (1) Mendorong ekonomi lokal untuk tumbuh dan menciptakan tambahan lapangan kerja, (2) Mendayagunakan sumber daya lokal yang tersedia

secara lebih baik, (3) Menciptakan ruang dan peluang untuk penyelarasan suplai dan permintaan, (4) Serta mengembangkan peluang-peluang baru bagi bisnis. Sebagai perbandingan berikut ini dikutip definisi pengembangan ekonomi lokal menurut Bank Dunia (2004) dalam Dendy, et.al (2004), yakni: "...suatu proses di mana sektor publik, bisnis dan nonpemerintah bekerja sama menciptakan kondisi-kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja."

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi lokal adalah sebuah proses yang membentuk kemitraan pemeran pemangku kepentingan ekonomi, yakni pemerintah daerah, kelompok-kelompok berbasis masyarakat dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk menciptakan lapangan kerja dan menggiatkan (stimulasi) ekonomi daerah. Pendekatan tersebut menekankan kewenangan lokal (local control), menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya fisik dan kelembagaan. Dengan demikian, kemitraan pengembangan ekonomi lokal mengintegrasikan upaya mobilisasi para aktor, organisasi dan sumber daya, serta pengembangan kelembagaan baru melalui dialog dan kegiatan-kegiatan strategik.

2.2. Peran Lembaga Ekonomi Lokal Dalam Penyediaan Layanan Dasar

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian, ketika desa hendak menggunakan kewenangannya dalam membangun infrastruktur sebaiknya desa mempertimbangkan dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung akses masyarakat terhadap layanan dasar dan infrastruktur yang bisa mendorong produktivitas masyarakat desa.

Berdasarkan UU Desa, desa dapat menyelenggarakan penyediaan layanan dasar dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan definisi tersebut BUMDesalah yang diharapkan mengelola aset dan jasa pelayanan, terutama layanan dasar yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDesa

diharapkan mengelola layanan dasar untuk kebutuhan strategis bagi masyarakat yang pada ujungnya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat desa.

Bagaimana pemenuhan dan penyediaan layanan dasar di kelurahan? UU No. 23 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan. Pelayanan dasar publik harus dijamin dan diberikan oleh badan publik yang dibentuk oleh pemerintah kelurahan dengan dukungan dana dari pemerintah daerah. Badan publik atau badan pengelola ini harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat berdasarkan prinsip terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan melibatkan masyarakat

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan penelitian melalui sasaran-sasaran yang telah dirumuskan, digunakan metode-metode analisis sebagai berikut.

3.1. Analisis *Location Quotient (LQ)*

Analisis LQ merupakan suatu teknik analisis sederhana yang digunakan untuk mengetahui komoditas basis yang ada di kawasan pesisir Kecamatan Bulak. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan jumlah produksi komoditas di kawasan pesisir Kecamatan Bulak dengan jumlah produksi komoditas di Kota Surabaya. Formula analisis LQ sebagai berikut.

$$LQ = \frac{V_{ik}/V_k}{V_{ip}/V_p}$$

V_{ik} = jumlah produksi komoditas perikanan

V_k = jumlah produksi seluruh komoditas perikanan

V_{ip} = jumlah produksi komoditas perikanan

V_p = jumlah produksi seluruh komoditas perikanan

Jika nilai $LQ > 1$, maka komoditas tersebut merupakan komoditas basis. Jika nilai $LQ < 1$, maka komoditas tersebut bukan merupakan komoditas basis atau non basis di Kecamatan Bulak. Jika $LQ = 1$, laju pertumbuhan komoditas tersebut di Kecamatan Bulak sama dengan laju pertumbuhan komoditas yang sama di Kota Surabaya.

3.2. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis kedua dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, masalah, peluang, dan ancaman dari pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Bulak. Analisis ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif berdasarkan kondisi eksisting kawasan pesisir Kecamatan Bulak. Ilustrasi matriks potensi, masalah, peluang, dan ancaman (SWOT) adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Matriks SWOT

Strength	Weakness
- S1 - S2 - Dst...	- W1 - W2 - Dst...
Opportunity	Threat
- O1 - O2 - Dst...	- T1 - T2 - Dst...

3.3. Analisis SWOT

Berdasarkan potensi, masalah, peluang, dan ancaman yang telah diidentifikasi sebelumnya, kemudian disusun strategi pengembangan menggunakan analisis SWOT. Strategi disusun untuk memaksimalkan potensi, meminimalisasi masalah, dengan memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman. Ilustrasi matriks strategi SWOT adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Matriks Strategi SWOT

Strategi S-O	Strategi S-W
- Strategi S1-O1 - Strategi S2-O2 - Dst...	- Strategi S1-W1 - Strategi S2-W2 - Dst...
Strategi W-O	Strategi W-T
- Strategi W1-O1 - Strategi W2-O2 - Dst...	- Strategi W1-T1 - Strategi W2-T2 - Dst...

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. GAMBARAN UMUM

Kecamatan Bulak merupakan salah satu kecamatan yang terletak di sebelah utara Kota Surabaya dengan luas wilayah 7,72 km². Batas administrasi Kecamatan Bulak adalah sebagai berikut.

Utara : Selat Madura

Timur : Kecamatan Kenjeran

Selatan : Kecamatan Tambak Sari

Barat : Kecamatan Semampir

Kecamatan Bulak terbagi menjadi empat kelurahan yaitu Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Sidotopo Wetan, Tambak Wedi, dan Bulak Banteng. Dari keempat kelurahan tersebut, Kelurahan Tambak Wedi dan Bulak Banteng merupakan dua kelurahan yang memiliki kawasan pesisir.

Jumlah penduduk di Kecamatan Bulak sebanyak 158.554 jiwa, dengan persebaran 31.174 jiwa di Kelurahan Bulak Banteng dan 13.787 jiwa di Kelurahan Tambak Wedi (BPS Kecamatan Bulak, 2020). Jika dilihat dari tingkat pendidikan, masyarakat kawasan pesisir Kecamatan Bulak masih didominasi masyarakat lulusan SLTA, SD, dan tidak sekolah. Artinya, tingkat pendidikan masyarakat kawasan pesisir Kecamatan Bulak masih

rendah. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di kawasan pesisir Kecamatan Bulak adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kawasan Pesisir
Kecamatan Bulak**

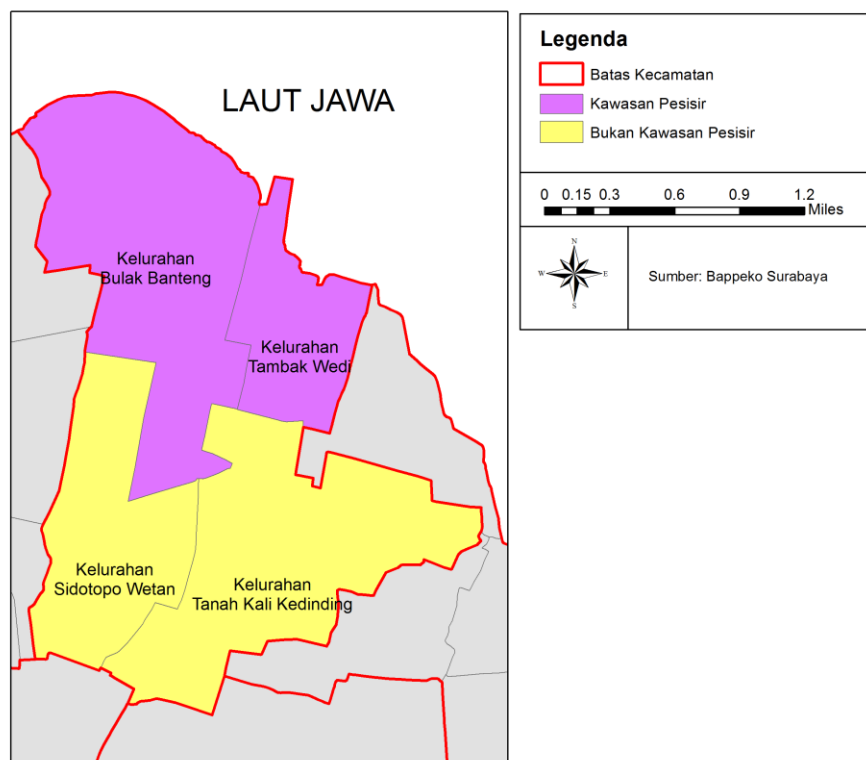
Tingkat Pendidikan	Kelurahan Banteng	Kelurahan Tambak Wedi
Tidak Sekolah	9,115	4,096
SD	10,034	4,178
SLTP	3,936	2,175
SLTA	7,169	2,894
Akademi	215	108
Universitas	684	317
Strata II	20	17
Strata III	1	1

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2020

Kecamatan Bulak dilalui jalan arteri sekunder yaitu Jalan Raya Bulak, serta jalan kolektor sekunder seperti Jalan Sukolilo Lor dan Jalan Nambangan. Selain itu, Kecamatan Bulak direncanakan untuk dilewati oleh jaringan jalan *Outer East Ring Road* (OERR) yang saat ini sudah mulai dibangun.

Untuk ketersediaan jaringan utilitas, Kecamatan Bulak sudah dilalui oleh jaringan listrik yang didistribusikan oleh PT. PLN Rayon Bulak. Jaringan listrik ini sudah tersebar di seluruh kelurahan di Kecamatan Bulak termasuk pada kawasan pesisir. Sedangkan untuk jaringan air bersih, masih belum

semua masyarakat mendapat layanan air bersih dari PDAM. Beberapa masyarakat, termasuk masyarakat kawasan pesisir, masih menggunakan sumur yang airnya terkadang keruh dan tidak bisa digunakan (Kompas, 2008). Saat ini PDAM Kota Surabaya telah merencanakan pemasangan pipa tersier secara gratis untuk beberapa kawasan di Surabaya, termasuk Kecamatan Bulak (bpps Pam.com, 2020). Hal ini dilakukan karena air tanah di Kecamatan Bulak tidak stabil dan tidak selalu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat.



Gambar 1. Peta Kecamatan Bulak

Kecamatan Bulak dikenal sebagai kawasan yang memiliki keanekaragaman sumberdaya hayati yang cukup baik dan potensial.

Dengan kekayaan ekosistem ikan dan pesisir, dikembangkan suatu kawasan pariwisata bahari yaitu Taman Hiburan Pantai dan Pantai Ria Surabaya. Kedua kawasan wisata tersebut menjadi pusat kegiatan wisata berbasis kelautan dan pesisir. Adanya potensi wisata ini berdampak pada penduduk lokal untuk membuka usaha di sekitar kawasan wisata.



Gambar 1. Kondisi Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Bulak

Pada kawasan pesisir Kecamatan Bulak saat ini sudah berkembang berbagai kegiatan perdagangan dan jasa berbasis perikanan di jalan-jalan utama. Komoditas-komoditas yang dijual bervariasi mulai dari komoditas perikanan mentah hasil tangkapan laut, hingga komoditas yang sudah diolah. Kegiatan perdagangan dan jasa ini banyak dijumpai di Jalan Sukililo Lor, Jalan Pantai Bulak, Jalan Nambangan, dan Jalan Kedung Cowek. Kondisi bangunan yang digunakan

untuk perdagangan dan jasa di kawasan pesisir Kecamatan Bulak ini berupa rumah tinggal, rumah toko, toko berderet, hingga bangunan tidak permanen yang dapat dibongkar pasang sehingga mengganggu arus lalu lintas di sekitarnya serta mengurangi kapasitas jalan.

Jenis-jenis komoditas yang dijual di kawasan pesisir Kecamatan Bulak cukup beragam, antara lain sebagai berikut:

- Hasil olahan laut (makanan dan minuman), terletak di sepanjang Jalan Pantai Bulak. Kegiatan ini dilakukan masyarakat secara individu dan kelompok. Jenis-jenis ikan yang diproduksi di kawasan pesisir Kecamatan Bulak antara lain bandeng, udang, tawes, tombro, dan mujair. Jumlah produksi dari komoditas-komoditas tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Jumlah Produksi Perikanan di Kecamatan Bulak

Komoditas	Jumlah Produksi (Ton)
bandeng	78.5
udang	8
tombro	2
mujair	20.3
Jumlah	108.8

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2020



Gambar 2. Kegiatan Perdagangan Hasil Perikanan dengan Bangunan yang Tidak Permanen

- Hasil kerajinan laut (hiasan, perabot, dan sebagainya), terletak di Jalan Pantai Bulak. Kegiatan ini dilakukan masyarakat secara individu dan kelompok. Komoditas yang digunakan seperti kerang-kerangan yang dapat ditemukan di tepi-tepi pantai.



Gambar 3. Kondisi Kegiatan Perdagangan Produk Kerajinan Berbasis Pesisir di Kecamatan Bulak

- Pusat pengolahan ikan Bulak, terletak di Jalan Cumpat Kulon. Kegiatan ini terdiri dari pengolahan dan penjualan hasil laut secara terpusat dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Kegiatan ini belum digunakan secara optimal yang dapat dilihat dari kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat.



Gambar 4. Kondisi Bangunan Pusat Pengolahan Ikan Bulak

Jika dilihat dari kondisinya, walaupun pemerintah telah memberikan dukungan berupa penyediaan sentra pengolahan ikan, partisipasi masyarakat setempat masih rendah. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya jumlah wisatawan pada kegiatan wisata bahari. Selain kondisi beberapa bangunan perdagangan dan jasa yang tidak permanen, beberapa bangunan kondisinya kurang baik yang dapat dilihat dari kurangnya

kebersihan maupun papan nama yang sudah tidak terbaca. Kondisi seperti ini tentu saja kurang mampu menarik pengunjung atau wisatawan.

Dari segi penghasilan, menurut masyarakat setempat penghasilan yang didapatkan dari hasil penjualan ikan dan hasil olahan ikan maupun kerajinan masih belum dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi bangunan yang kurang baik, seperti yang dijelaskan sebelumnya, mencerminkan dari kurangnya penghasilan maupun modal dari masyarakat sehingga mereka tidak mampu memperbaiki kualitas fisik dari tempat usahanya.

2. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Komoditas Basis Kawasan Pesisir Kecamatan Bulak

Salah satu tujuan dari PEL adalah untuk mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien, agar tidak terjadi eksploitasi secara berlebihan akibat adanya otonomi daerah (Munir dan Fitanto, 2007). Karena itu dalam menerapkan PEL pada kawasan pesisir Kecamatan Bulak, dilakukan analisis untuk mengetahui komoditas-komoditas pesisir yang potensial untuk dikembangkan melalui PEL.

Komoditas-komoditas yang dianalisis antara lain komoditas perikanan yang diproduksi di Kecamatan Bulak. Komoditas perikanan merupakan Komoditas-komoditas tersebut antara lain bandeng, udang,

tawes, tombro, dan mujair. Jumlah produksi seluruh komoditas tersebut di Kecamatan Bulak dibandingkan dengan jumlah produksi di Kota Surabaya, yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. Jumlah Produksi Perikanan di Kecamatan Bulak dan Kota Surabaya

Komoditas	Jumlah Produksi (Ton)	
	Kecamatan Bulak	Kota Surabaya
bandeng	78.5	4760.71
udang	8	1625.73
tawes	0	14.53
tombro	2	10.91
mujair	20.3	0.62
Jumlah	108.8	6412.5

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2020

Berdasarkan data jumlah produksi komoditas di atas, dilakukan analisis LQ dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Analisis LQ

sektor	2015	2016	2017	2018	Rata2	Ket.
Pertanian	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	Basis
Pertambangan	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	Tidak Basis
Industri Pengolahan	2.3	2.2	2.1	2.1	2.2	Basis
Pengadaan Listrik & Gas	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Tidak Basis
Pengadaan Air	1	1	0.9	1	1	Basis
Konstruksi	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	Basis
Perdagangan	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	Basis
Transportasi	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	Basis
Penyediaan Akomodasi	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Tidak Basis
Informasi	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	Basis
Jasa Keuangan	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	Tidak Basis
Real Estat	1	1	0.9	1	1	Basis
Jasa Perusahaan	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Tidak Basis
Admin Pemerintah	2	2	2	2	2	Basis
Jasa Pendidikan	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	Basis
Jasa Kesehatan	0.9	0.9	0.9	1	0.9	Tidak Basis
Jasa Lainnya	1.9	1.9	1.9	2	1.9	Basis

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel 6, maka dapat teridentifikasi sektor-sektor mana saja yang terdapat di Kecamatan Bulak yang merupakan sektor-sektor basis maupun sektor non basis. Kecamatan Bulak ini mempunyai 10 sektor basis, sektor tersebut yaitu sektor pertanian dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1,3, sektor industri pengolahan dengan indeks LQ rata-rata sebesar 2,2, sektor pengadaan air dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1, sektor konstruksi dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1,6, sektor transportasi dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1,6, sektor

informasi dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1,2, sektor real estat dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1, sektor admin pemerintah dengan indeks LQ rata-rata sebesar 2, sektor jasa pendidikan dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1,9, sektor perdagangan dengan indeks LQ rata-rata sebesar 2,1. sektor basis yang terakhir adalah sektor jasa lainya dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1,9. Sehingga sektor tersebut merupakan sektor basis dengan indeks rata-rata terbesar.

Hal ini menunjukkan bahwa sepuluh sektor tersebut merupakan sektor basis yang menggambarkan bahwa sektor tersebut memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kecamatan Bulak serta sektor ini sudah mampu memenuhi kebutuhan di wilayahnya bahkan berpotensi ekspor. Atas dasar pemahaman di atas, sektor ini merupakan sektor yang potensial dimana sektor ini dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Tabel 7. Komponen *Shift Share* Kec. Bulak Tahun 2015-2019

Tahun	G_j	N_j	G_j - N_j
2014 - 2015	582.3	262494.5	-253912
2015 - 2016	915.9	331375.8	-322360
2016 - 2017	909.5	368560.9	-359071
2017 - 2018	962.4	479147.5	-469185

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014-2015 komponen pertumbuhan PDRB total Kecamatan Bulak (Gj) adalah 582.3 padahal banyaknya pertumbuhan PDRB Kecamatan Bulak apabila pertumbuhannya sama dengan laju pertumbuhan PDRB Kota Surabaya (Nj) sebesar 262494.5 ini berarti terjadi penyimpangan negatif sebesar - 253912 dan ini menunjukkan pertumbuhan PDRB di Kecamatan Bulak lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB di Kota Surabaya.

Di tahun berikutnya 2015-2016 dari kedua komponen Gj dan Nj masing-masing mengalami penurunan, namun walaupun penyimpangan yang terjadi mengalami peningkatan dan menunjukkan nilai negatif yaitu sebesar -322360 yang berarti pertumbuhan PDRB Kecamatan Bulak masih lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Kota Surabaya. Pada tahun 2016-2017 untuk masing-masing komponen Gj dan Nj mengalami peningkatan lagi. penyimpangan yang terjadi juga mengalami perlambatan dengan angka negatif sebesar -359071 hal ini berarti pada tahun ini pertumbuhan PDRB di Kecamatan Bulak juga lebih rendah dari pertumbuhan PDRB di Kota Surabaya.

Pada tahun 2017-2018, komponen pertumbuhan ekonomi total Kecamatan Bulak (Gj) mengalami peningkatan menjadi sebesar 962.4 dan komponen pertumbuhan ekonomi total Kota Surabaya juga

mengalami peningkatan menjadi sebesar 479147.5 dan penyimpangan yang terjadi mengalami penurunan dengan angka negatif yaitu sebesar -469185 hal ini menunjukkan pertumbuhan PDRB Kecamatan Bulak adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB di Kota Surabaya.

b. Potensi, Masalah, Peluang, dan Ancaman Pengembangan Kawasan Pesisir Kecamatan Bulak

Berdasarkan kondisi eksisting kawasan pesisir Kecamatan Bulak, dapat diketahui potensi, masalah, peluang, serta ancaman.

Potensi adalah kondisi eksisting kawasan pesisir Kecamatan Bulak yang mendukung pengembangan kawasan melalui pendekatan PEL. Sedangkan masalah adalah kelemahan kawasan yang menjadi kendala pengembangan kawasan dengan pendekatan PEL.

Peluang adalah keadaan atau kondisi di kawasan pesisir yang bukan merupakan bagian dari kegiatan perdagangan atau industri pengolahan yang akan dikembangkan. Walaupun tidak termasuk kegiatan yang akan dikembangkan, kondisi ini mampu mendukung pengembangan PEL di kawasan pesisir Kecamatan Bulak. Yang terakhir adalah ancaman, yang juga merupakan kondisi kawasan pesisir Kecamatan Kenejran di luar

kegiatan yang akan dikembangkan melalui PEL, namun dapat menjadi kendala pengembangan PEL di Kecamatan Bulak.

Potensi, masalah, peluang, dan ancaman kawasan pesisir Kecamatan Bulak disusun dalam matriks SWOT sebagai berikut.

Tabel 8. Matriks SWOT Kawasan Pesisir Kecamatan Bulak

Strength	Weakness
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada minat dari masyarakat setempat untuk mengembangkan industri pengolahan komoditas pesisir skala rumah tangga yang dilakukan secara individu dan kelompok 2. Kecamatan Bulak memiliki komoditas perikanan basis yaitu tombro dan mujair 3. Kawasan pesisir Kecamatan Bulak sudah terlayani jaringan listrik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada beberapa kawasan yang belum dilewati jaringan air bersih dan masih mengandalkan air tanah dari sumur 2. Kondisi bangunan perdagangan yang menawarkan produk olahan komoditas pesisir kurang baik 3. Pendapatan masyarakat setempat rendah, mengakibatkan kurangnya modal untuk memperbaiki kondisi bangunan yang kurang baik 4. Tingkat pendidikan masyarakat kawasan pesisir Kecamatan Bulak masih rendah
Opportunity	Threat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pesisir Kecamatan Bulak dilalui jalan arteri, serta direncanakan untuk dilalui jalan <i>Outer East Ring Road</i> 2. Adanya pengembangan kawasan wisata bahari di Kecamatan Bulak yang dapat menarik pengunjung 3. Sudah ada dukungan dari pemerintah berupa sentra pengolahan ikan Bulak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya minat pengunjung atau wisatawan terhadap produk hasil olahan komoditas pesisir

Sumber: Hasil Analisis, 2020

c. Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir Kecamatan Bulak dengan Pendekatan PEL

Setelah matriks SWOT disusun untuk mengetahui potensi, masalah, peluang, dan ancaman pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Bulak, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi pengembangan melalui pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Pendekatan ini dipilih karena pertimbangan sebagai berikut:

- Kegiatan pengolahan komoditas pesisir seperti perikanan dan kerang-kerangan sudah berkembang di masyarakat setempat
- Kegiatan pengolahan hasil perikanan sudah mendapat dukungan dari pemerintah
- Dalam penerapan PEL diperlukan peran masyarakat dan pemerintah serta adanya material atau sumberdaya alam sebagai bahan baku. Kawasan pesisir Kecamatan Bulak sudah memiliki ketiga komponen tersebut.

Strategi pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Bulak melalui pendekatan PEL dirumuskan berdasarkan matriks SWOT yang telah disusun sebelumnya. Strategi disusun sebagai upaya mengoptimalkan potensi dan mengatasi permasalahan kawasan, dengan memaksimalkan peluang yang ada untuk menghindari atau meminimalisasi ancaman

yang mungkin datang.Strategi pengembangan PEL pada kawasan pesisir Kecamatan Bulak adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Matriks Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir Kecamatan Bulak Melalui Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Strategi S-O	Strategi S-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sentra pengolahan komoditas pesisir 2. Menyediakan sentra pemasaran hasil olahan komoditas pesisir yang terintegrasi dengan kawasan wisata bahari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kemasan yang menarik dan ramah lingkungan untuk produk hasil olahan dengan melibatkan masyarakat setempat 2. Melakukan pemasaran wilayah melalui media maupun program promosi
Strategi W-O	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Merealisasikan pembangunan pipa distribusi PDAM pada kawasan yang belum terlayani jaringan air bersih 2. Menyusun program pengadaan modal untuk pelaku industri rumah tangga pengolahan komoditas pesisir melalui fasilitas pemodalannya seperti bank dan koperasi 3. Menyediakan sentra pemasaran hasil olahan komoditas pesisir yang terletak di jaringan jalan utama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sentra pemasaran yang terintegrasi dengan kawasan wisata bahari 2. Mengadakan program pelatihan pengolahan komoditas pesisir untuk menanamkan kreativitas dan inovasi serta iklim wirausaha pada masyarakat setempat

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil perumusan strategi di atas, maka strategi-strategi yang akan dilakukan untuk pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Bulak dijabarkan sebagai berikut.

- **Menyediakan sentra pengolahan komoditas pesisir**

Menurut Blakely dalam Oktaviani (2012), komposisi industri dan sumberdaya alam termasuk faktor yang mempengaruhi penerapan

PEL pada suatu wilayah. Karena itu disusun strategi penyediaan sentra pengolahan komoditas pesisir berupa industri pengolahan skala rumah tangga dengan memanfaatkan komoditas pesisir lokal. Sentra pengolahan komoditas pesisir yang dikembangkan dibagi menjadi pengolahan hasil perikanan dan kerajinan berbasis pesisir. Untuk sentra pengolahan komoditas pesisir berbasis perikanan dapat ditempatkan lebih jauh dari permukiman penduduk karena berpotensi menimbulkan polusi berupa bau amis. Komoditas utama yang diolah adalah tombo dan mujair karena merupakan komoditas basis Kecamatan Bulak. Penyediaan sentra pengolahan ikan ini juga dilakukan dengan cara menghidupkan kembali sentra pengolahan ikan Bulak yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sedangkan untuk sentra kerajinan berbasis pesisir dapat dilakukan di kawasan permukiman penduduk. Bahan baku kerajinan ini dapat berupa kerang-kerangan yang bisa ditemukan di pesisir pantai Bulak.

- **Menyediakan sentra pemasaran hasil olahan komoditas pesisir yang terintegrasi dengan wisata bahari dan terletak di jaringan jalan utama**

Menurut Blakely dalam Supriyadi (2007), salah satu indikator keberhasilan PEL adalah keberadaan lembaga usaha mikro dan kecil

dalam proses produksi dan pemasaran. Artinya, tidak hanya proses produksi atau pengolahan yang harus dikembangkan, tetapi juga pemasaran. Saat ini bangunan-bangunan non permanen yang digunakan masyarakat untuk memasarkan hasil olahan komoditas pesisir dinilai kurang layak dan lokasinya illegal. Karena itu perlu ada penyediaan sentra pemasaran dengan bangunan permanen yang layak dan lokasinya strategis, yaitu pada jalan-jalan utama. Penyediaan sentra pemasaran hasil olahan ini harus terintegrasi dengan sentra pengolahan. Selain itu, sentra pemasaran ini dapat diintegrasikan dengan kawasan wisata bahari yang sudah ada.

- **Menyediakan infrastruktur yang mendukung PEL**

Pengembangan PEL pada kawasan pesisir Kecamatan Bulak dilakukan salah satunya dengan mengembangkan kegiatan produksi melalui industri rumah tangga. Menurut Tarigan (2007) dalam mengembangkan suatu industri, dibutuhkan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Salah satu infrastruktur dasar yang belum terdistribusi secara merata di Kecamatan Bulak adalah jaringan air bersih. Karena itu penyediaan jaringan air bersih harus menjadi prioritas karena jaringan ini juga dibutuhkan dalam proses pengolahan komoditas pesisir.

- **Menyusun program pengadaan modal bagi pelaku industri rumah tangga pengolahan komoditas pesisir**

Menurut Munir dan Fitanto (2007), kemampuan pemodal merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaku PEL. Karena itu dalam mengembangkan suatu wilayah melalui pendekatan PEL, sarana penyedia modal harus diperhatikan dan diprioritaskan. Dalam pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Bulak ini dapat dilakukan program pengadaan modal untuk masyarakat setempat, agar dapat mendukung kegiatan industri pengolahan yang dikembangkan. Program pengadaan modal ini berlaku untuk masyarakat yang menjadi pelaku industri rumah tangga yang mengolah komoditas pesisir, baik perikanan maupun kerajinan. Program ini dapat dilakukan oleh pemerintah melalui fasilitas keuangan seperti koperasi atau bekerja sama dengan bank.

- **Menyusun program pelatihan ketrampilan masyarakat setempat**

Menurut Krugman dalam Susanti dkk (2013), pengembangan sumberdaya manusia merupakan komponen paling penting dalam PEL terutama pada negara berkembang. Karena itu perlu ada program

yang dapat meningkatkan ketrampilan masyarakat, mengingat tingkat pendidikan masyarakat pesisir Kecamatan Bulak masih rendah. Program ini disusun dengan dengan dua tujuan. Yang pertama untuk melatih masyarakat membuat kemasan yang menarik dan ramah lingkungan untuk menambah daya tarik produk hasil olahan komoditas pesisir. Hal ini perlu dilakukan untuk menarik pembeli atau pengunjung. Kemasan ini juga dapat didesain sehingga menjadi ciri khas produk kawasan pesisir Kecamatan Bulak. Yang kedua, pelatihan ketrampilan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan *skill* masyarakat dalam kegiatan pengolahan komoditas pesisir. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat melalui teknologi baru. Kemampuan penguasaan teknologi juga merupakan hal penting terutama dalam konteks pengolahan karena dapat menyebabkan penemuan produk baru dan cara produksi yang efisien (Krugman dalam Susanti dkk, 2013).

- **Melakukan pemasaran wilayah melalui media dan program promosi**

Menurut Van Den Berg dalam Murwito (2013), pemasaran wilayah dapat dilihat sebagai suatu jenis eksploitasi produk daerah yang berorientasi pasar oleh pihak pemerintah daerah. Artinya, pemasaran

wilayah dilakukan sebagai upaya memasarkan produk wilayah tersebut untuk menarik konsumen yang terdiri dari penduduk, pengusaha, wisatawan, pengunjung, maupun investor. Kawasan pesisir Kecamatan Bulak memiliki produk olahan komoditas pesisir yang dapat menjadi daya tarik pasar. Pemasaran wilayah dapat dilakukan untuk memperkenalkan produk tersebut sebagai salah satu ciri khas dari kawasan pesisir Kecamatan Bulak, mengingat salah satu kelemahan dari kawasan pesisir Kecamatan Bulak adalah kurangnya minat pengunjung atau wisatawan terhadap produk yang dihasilkan masyarakat setempat. Pemasaran wilayah ini dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan membuat program promosi melalui pameran yang dilaksanakan secara rutin. Selain itu, dapat dilakukan pemasaran melalui internet dengan membuat website. Dengan teknologi internet, pemasaran yang dilakukan tidak hanya mencapai lingkup nasional, namun juga internasional. Selain memasarkan produk dari kawasan pesisir Kecamatan Bulak, pemasaran wilayah ini juga dapat memasarkan kawasan wisata bahari yang ada di Kecamatan Bulak.

BAB V

KESIMPULAN

Kawasan pesisir Kecamatan Bulak merupakan salah satu kawasan pesisir yang memiliki keanekaragaman sumberdaya pesisir yang potensial. Saat ini telah berkembang kegiatan-kegiatan usaha pemasaran komoditas pesisir melalui kegiatan pengolahan sederhana yang dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok masyarakat. Pemerintah juga telah memberikan dukungan melalui penyediaan sentra pengolahan ikan Bulak. Namun pada kenyataannya, kegiatan ini justru tidak berkembang karena kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya minat pengunjung terhadap produk olahan masyarakat setempat. Karena itu, pendekatan PEL dirasa tepat untuk pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Bulak dengan cara menciptakan iklim wirausaha melalui kegiatan pengolahan dan pemasaran.

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam PEL adalah:

a. Sumberdaya alam

Sumberdaya alam sebagai bahan baku yang diolah, dalam kasus ini adalah komoditas pesisir seperti perikanan dan kerang-kerangan. Karena itu apabila suatu kawasan memiliki komoditas basis atau unggul, hal tersebut akan menjadi kelebihan dalam penerapan PEL.

b. Sumberdaya manusia

Salah satu tujuan utama dari PEL adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Karena itu, dalam penerapannya masyarakat harus dilibatkan. Karena itu, ketrampilan atau *skill* dari masyarakat sangat penting. Ketrampilan ini dapat dibentuk melalui program-program pelatihan.

c. Teknologi

Adanya teknologi dapat menambah efisiensi kegiatan produksi. Karena itu inovasi teknologi sangat penting untuk menciptakan produk-produk baru yang inovatif. Pengembangan teknologi ini harus diimbangi dengan pengembangan sumberdaya manusia.

d. Modal

Modal merupakan komponen utama yang sering menjadi kendala bagi masyarakat untuk memulai usaha. Masalah permodalan bisa menjadi masalah utama kurang berkembangnya suatu wilayah. Karena itu pemerintah harus memperhatikan penyediaan modal dalam penerapan PEL agar kegiatan usaha masyarakat dapat berjalan.

e. Peran pemerintah dan masyarakat

PEL didefinisikan sebagai proses kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya lokal secara efektif dan efisien. Artinya, peran pemerintah sangat menentukan dalam penerapan PEL. Pemerintah berperan sebagai penyedia modal dan fasilitas pendukung PEL, serta mendampingi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha.

f. Pasar

Salah satu tujuan penerapan PEL adalah untuk meningkatkan ekspor. Artinya, dalam penerapan PEL harus berorientasi pada pasar yang lebih luas. Dalam kasus ini, pasar yang dimaksud adalah masyarakat di luar Kecamatan Bulak yaitu masyarakat Kota Surabaya, Indonesia, bahkan internasional. Tidak hanya masyarakat, PEL juga dapat menarik pihak swasta atau investor.

g. Pemasaran wilayah

Setelah PEL diterapkan, harus ada suatu upaya publikasi agar masyarakat luas tahu tentang keberadaan PEL di suatu wilayah. Pemasaran wilayah ini menjadi tugas pemerintah untuk mempublikasikan wilayah yang dikembangkan melalui daya tarik produk yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Kecamatan Bulak dalam Angka 2020*. BPS Kota Surabaya.
- Oktaviani, D, dan Sardjito. 2012. *Pengembangan Industri Berbasis Perikanan dengan Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Tuban*. Jurnal Teknik POMITS 1(1): 1-5.
- Munir, R, dan B. Fitanto. 2007. *Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif: Masalah, Kebijakan dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan*. LGSP. Jakarta.
- Susanti, EA. 2013. *Pengembangan Ekonomi lokal dalam Sektor Pertanian (Studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik 1(4): 31-40.

- Supriyadi, E. 2007. *Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal: Pragmatisme dalam Praktek Pendekatan PEL*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota 18(2): 103-123.
- Tarigan, R. 2007. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kompas. 2008. Tambak Wedi Kesulitan Air Bersih. <http://digilib-ampl.net/detail/detail.php?row=6&tp=kliping&ktg=airminum&kode=7317>. 30 Desember 2020 (19.12).
- Surabaya Post. 2020. PDAM Gratiskan Pipa Tersier. http://www.bppspam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=406:pdam-gratiskan-pasang-pipa-tersier-&catid=34:bam. 30 Desember 2020 (19.50).
- Murwito, S. 2013. *Memberdayakan Investasi Daerah Melalui Regional Marketing*. KPPOD Edisi Juli-September.



ISBN 978-623-94837-7-7



9 786239 483777